

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan kebersihan di Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Kajian ini mengacu pada kerangka teoritis mengenai faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan.

##### **1. Komunikasi**

Salah satu kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan kebersihan adalah kurang efektifnya komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran utama. Proses komunikasi, baik yang ditujukan kepada pelaksana kebijakan maupun masyarakat, belum optimal. Upaya-upaya yang telah dilakukan, seperti koordinasi dengan RT/RW dan pemanfaatan Kantor Surabaya Sehat, belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah masih belum optimal. Terdapat ketidakkonsistenan dan kurangnya jangkauan dalam penyampaian informasi kepada seluruh kelompok masyarakat, terutama masyarakat perkotaan padat penduduk. Hal ini mengakibatkan pemahaman yang beragam mengenai kebijakan dan praktik pengelolaan sampah yang masih belum optimal di kalangan masyarakat.

## 2. Sumber Daya

Program pengelolaan sampah masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya. Jumlah personel yang terbatas dan kurangnya kompetensi dalam pengelolaan sampah menjadi hambatan utama. Selain itu, fasilitas yang belum memadai juga turut memperparah situasi. Meski demikian, patut diakui bahwa para pelaksana program telah memiliki pedoman kerja yang jelas. Dalam konteks kewenangan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya telah membentuk tim kerja khusus yang berfokus pada bidang kebersihan dan pemberdayaan masyarakat. Tim ini berperan sebagai pelaksana dan pendukung kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas.

## 3. Disposisi

Pemerintah Kota Surabaya, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), telah menunjukkan komitmen yang baik dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Hal ini terlihat dari pemahaman, sikap, dan respons yang ditunjukkan oleh para pelaksana kebijakan. Namun demikian, evaluasi lebih lanjut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya adil, tegas, dan konsisten, terutama dalam menjangkau masyarakat di daerah pedesaan dan kawasan padat penduduk. Meskipun sebagian besar masyarakat telah menunjukkan pemahaman dan sikap yang positif terhadap kebijakan pengelolaan sampah, namun perilaku yang ditunjukkan masih belum konsisten. Hal ini terlihat dari kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama setelah pelaksanaan kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya telah dirancang dengan jelas, membagi tugas dan tanggung jawab secara rinci. Bahkan, telah dibentuk tim kerja khusus untuk menangani masalah pengelolaan sampah. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara struktur organisasi yang ada dengan praktik yang berjalan. Hal ini mengindikasikan adanya kekurangan dan hambatan dalam hal fragmentasi tugas dan belum terstandarisasinya prosedur operasional standar (SOP).

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan kebersihan di Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, telah menunjukkan progres yang positif. Namun, evaluasi lebih lanjut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya merata. Masih terdapat segmen masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan praktik pengelolaan sampah yang baik.

#### 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, bentuk kontribusi pad penelitian ini yaitu dalam bentuk saran. Adapun hal yang akan menjadi saran berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan kebersihan di Kecaamatan Simokerto Kota Surabaya yaitu:

1. Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, perlu disusun secara rinci Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan komprehensif. Dokumen SOP ini akan menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Selain itu, penyusunan petunjuk teknis yang spesifik akan sangat

membantu petugas lapangan dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien.

2. Untuk mencapai keberhasilan yang optimal dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat. Hal ini meliputi peningkatan jumlah tenaga kerja, peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan, serta penyediaan fasilitas kerja yang memadai.
3. Pemerintah Kota Surabaya, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), perlu mengambil peran yang lebih proaktif dalam mensosialisasikan kebijakan pengelolaan sampah. Sosialisasi yang dilakukan harus bersifat intensif, inovatif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.
4. Keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Simokerto sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, namun masih terdapat sejumlah masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan praktik pengelolaan sampah yang baik. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan upaya untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan.
5. Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) secara efektif memerlukan pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan. Melalui sosialisasi yang

intensif, konsultasi berkala, serta pemberian teguran secara terukur, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah. Upaya-upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dapat menerapkan SOP secara konsisten dan optimal.